

## Analisis Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah

*Analysis of Coastal Community Empowerment Management at the People's Coalition Representative Office for Fisheries Justice, Central Sulawesi*

<sup>1</sup>Supriono\*, <sup>2</sup>Rukhayati, <sup>3</sup>Abdul Rahman

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu

(\*)Email Korespondensi: [supriono998@gmail.com](mailto:supriono998@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama; Proses Pengelolaan Masyarakat Pesisir meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan, dan Pengawasan. Pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah, telah mengikuti pedoman manajemen pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal ini dapat dilihat didalam proses penyusunan rencana strategi pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang diberi nama Program SULTENG TANGGUH. Untuk proses pengelolaan program pada kegiatan memperkuat komunitas pesisir dan mengembalikan sistem perekonomiannya telah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal sehingga tujuan program lebih tepat sasaran. Sementara untuk proses pengelolaan program pada kegiatan pembuatan sistem manajemen Pengurangan Resiko Bencana (*disaster Risk reduction*) berdasarkan pengetahuan lokal telah dilaksanakan sesuai dengan Perka BNPB 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan demikian pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir, mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil dapat dikatakan telah optimal. Kedua; faktor yang mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni dukungan dari masyarakat, dukungan dari fasilitator dan dukungan dari dukungan dari aparat desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya. Sedangkan faktor penghambat yakni aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

**Kata Kunci** : Pengelolaan, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir

### Abstract

*This study aims to determine the Management of Coastal Community Empowerment at the Representative Office of the People's Coalition for Fisheries Justice in Central Sulawesi and the factors that influence it. To achieve this goal, qualitative research methods are used by parsing the data descriptively. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed: First; The Coastal Community Management process includes Planning, Organizing, Mobilizing, and Monitoring. The management of coastal community empowerment carried out by the Representative Office of the People's Coalition for Fisheries Justice in Central Sulawesi, has followed the guidelines for the management of coastal community empowerment. This can be seen in the process of preparing a strategic plan for community empowerment management which is named the TANGGUH SULTENG PROGRAM. The program management process for activities to strengthen coastal communities and restore the economic system has been carried out by taking into account the socio-economic conditions of the local community so that the program objectives are more targeted. Meanwhile, the program management process for the creation of a Disaster Risk Reduction management system based on local knowledge has been implemented in accordance with BNPB Perka 1/2012 concerning General Guidelines for Disaster Resilient Villages. and maintenance results can be said to have been optimal. Second; Factors that influence the management of coastal community empowerment include supporting and inhibiting factors. The supporting factors are support from the community, support from facilitators and support from village/kelurahan apparatus and other related parties. While the inhibiting factors are environmental, economic and social aspects.*

**Keywords:** Management, Empowerment, Coastal Communities

## PENDAHULUAN

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia mencapai 6,23 juta jiwa atau sebesar 25,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional yang mencapai 24,79 juta orang (1). Salah satu penyebabnya adalah ketidakberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara maksimal. Masyarakat pesisir pada umumnya mengalami keterbelakangan dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya (2). Dengan demikian ketergantungan masyarakat pesisir kepada pemerintah menjadi lebih tinggi sehingga beban yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggung kebutuhan masyarakat akan ikut meningkat. Ketidakberdayaan pesisir atau masyarakat nelayan ini telah menjadi masalah pokok nasional yang penanganannya harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kemandirian social (3).

Disisi lain, fenomena kemiskinan nelayan sebagai masyarakat pesisir merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi. Adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, nyatanya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir itu sendiri. Kemiskinan dibagi menjadi tiga berdasarkan bentuknya, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (3).

Kualitas sumber daya manusia yang di tandai dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu indikator dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (4). Indikator ini sangat menentukan seseorang atau sekelompok orang berstatus golongan masyarakat miskin atau bukan miskin. Masalah kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan pengetahuan untuk pengelolaan sumberdaya dan teknologi menyebabkan rendahnya pendapatan (3). Masalah ini tentu saja membutuhkan peran aktif antara pihak luar dengan masyarakat pesisir sehingga dapat menghidupkan kualitas dan keterampilan masyarakat pesisir tanpa melunturkan karakter budayanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, salah satunya yaitu Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) (5). Kegiatan Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang telah berakhir sejak tahun 2014 (6). Dimana tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau Pengelolaan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di desa pesisir dan pulau-pulau kecil.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sebagai Organisasi Non-Pemeintah (ORNOP) atau *Non-Governmental Organization* (NGO) yang salah satu fokus kerjanya adalah "Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang Adil dan Berkelanjutan", telah ikut terlibat aktif dalam upaya pemulihan bencana melalui program-program pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis partisipatif.

Berbeda dengan organisasi lainnya yang hanya terlibat dalam membantu masyarakat terdampak pada masa tanggap darurat. KIARA melalui Program SULTENG TANGGUH, berkomitmen untuk mendampingi masyarakat pesisir terdampak bencana di Teluk Palu yang tidak hanya pada masa tanggap darurat tetapi sampai terbangunnya ketangguhan ekonomi dan ketangguhan bencana dengan membentuk organisasi berbasis komunitas nelayan di pesisir Teluk Palu. Program-program kegiatan yang dilaksanakan yaitu: 1) Memperkuat komunitas pesisir dan mengembalikan sistem perekonomiannya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki situasi ekonomi keluarga nelayan di Teluk Palu dengan mendistribusikan alat tangkap berupa perahu dan mesin sebanyak 650 unit kepada keluarga nelayan terdampak gempa bumi dan tsunami. 2) Mempromosikan dan mengimplementasikan pengetahuan lokal kebencanaan melalui pendekatan DRR. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun budaya sadar bencana berdasarkan pengetahuan lokal. 3) Mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya (media, pemerintah, organisasi lainnya) dengan tujuan yang sesuai dengan program. Tujuan program ini yaitu untuk mempromosikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sehingga menjadi rujukan metodologi dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat maupun dalam pembentukan kebijakan oleh pemerintah.

Program SULTENG TANGGUH ini telah dimulai sejak desember 2018 dan akan berakhir pada desember 2021 dan dilaksanakan di lima lokasi di Sulawesi Tengah. Empat kelurahan di Kota Palu dan satu desa di Kabupaten Donggala. Program ini diharapkan menjadi momentum perbaikan ataupun pemulihan kondisi perekonomian masyarakat pesisir dan mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri. Olehnya itu, pengelolaan program pemberdayaan masyarakat ini dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir di Sulawesi Tengah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah ?

## METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode pendekatan atau pendekatan studi kasus (*casestudy*) (7). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL

Dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir di Teluk Palu, Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah menyusun rencana strategi pengelolaan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen terhadap Program SULTENG TANGGUH. Untuk mempermudah proses analisis, peneliti akan menganalisis satu persatu fungsi dalam manajemen untuk mempermudah dalam proses analisa.

## Perencanaan

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir pada Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah diawali dengan tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini diawali dengan kegiatan sosialisasi yang merupakan tahap awal dalam memperkenalkan Program SULTENG TANGGUH kepada berbagai pihak yang terkait agar masyarakat dapat mengerti dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sosialisasi ini dilakukan dengan sasaran utama yakni masyarakat pesisir Teluk Palu yang dalam kondisi terdampak langsung bencana alam gempa bumi dan tsunami yang berakibat hilangnya alat tangkap serta sarana prasarana melaut agar mempunyai persepsi dan pandangan yang sama mengenai Program SULTENG TANGGUH, sehingga kegiatan yang nantinya akan dilakukan bersama dapat berjalan optimal. Di sisi lain, dengan melibatkan masyarakat, program ini diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, Sosialisasi mengenai Program SULTENG TANGGUH ini dilakukan oleh fasilitator atau *Field Officer* (Staff Lapangan). Substansi muatan dan orientasi pengenalan Program SULTENG TANGGUH lebih dititikberatkan pada upaya untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap posisi strategis Program SULTENG TANGGUH sebagai akses bagi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan mereka, dan tidak dipandang sebagai bantuan cuma- cuma atau belas kasihan. Program SULTENG TANGGUH juga menuntut adanya ikhtiar sungguh- sungguh dari masyarakat pesisir Teluk Palu untuk memperkuat dirinya dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada sebelum dapat mengakses bantuan Program SULTENG TANGGUH. Fasilitator harus menanamkan paradigma Program SULTENG TANGGUH bukan sekedar proyek “Penyaluran Bantuan”, melainkan sebagai proses pengokohan kelembagaan masyarakat agar pada akhirnya masyarakat mampu lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas agar mempercepat proses pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Setelah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan berdiskusi dengan masyarakat, fasilitator kemudian mengadakan orientasi awal untuk memahami gambaran umum Program SULTENG TANGGUH secara benar melalui pertemuan di tingkat desa dan kelurahan dengan mengadakan diskusi bertajuk “Diskusi Kampung dan Rembug Pesisir” yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, Ketua dari RT dan RW serta masyarakat pesisir terdampak (nelayan) untuk menggali aspirasi dan memutuskan kesiapan atau ketidaksiapan melaksanakan Program SULTENG TANGGUH. Apabila masyarakat menyatakan siap dan menerima program ini tahap selanjutnya adalah refleksi kemiskinan yang dilakukan oleh para relawan melalui *Focusses*

*Group Discussion (FGD)* dengan menggunakan teknik-teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)* guna menemukan serta mendorong masyarakat mampu merefleksikan masalah di wilayahnya dan terutama menumbuhkan kesadaran kritis warga bahwa akar persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan luntarnya nilai-nilai universal kemanusiaan (*Aspek moral*), prinsip kemasyarakatan (*Aspek Good Governance*), dan pembangunan berkelanjutan (*Aspek Tridaya*).

Tahap selanjutnya adalah pemetaan sumberdaya dan analisa kebutuhan oleh fasilitator, relawan dan masyarakat setempat melalui serangkaian kegiatan analisis sosial untuk merencanakan kegiatan pendukung pelaksanaan Program SULTENG TANGGUH. Dalam diskusi tersebut, masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasi mengenai harapan-harapan mereka dalam pelaksanaan Program SULTENG TANGGUH. Hasil diskusi tersebut disepakati beberapa hal, antara lain : 1) Berdasarkan data dari Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan data rekapitulasi Tim *Assessment KIARA* serta data dari nelayan, maka disepakati bahwa kebutuhan dasar yang diprioritaskan adalah sarana prasarana melaut yaitu perahu dan mesin. 2) Pembentukan kelompok evakuasi bencana berbasis komunitas pesisir melalui pendekatan *Disaster Risk Reduction (DRR)* berbasis pengetahuan lokal untuk membangun budaya sadar bencana serta mendorong kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. 3) Pembentukan lembaga atau unit usaha berbasis komunitas pesisir untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga nelayan dengan memanfaatkan modernisasi teknologi, informasi dan komunikasi. 4) Advokasi kepemilikan identitas usaha kelautan dan perikanan bagi para nelayan dalam rangka upaya memperoleh perlindungan usaha dari negara.

Pelaksanaan Program SULTENG TANGGUH diawali dengan membuat rencana program selama tiga tahun yang disusun berdasarkan rencana tahunan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Rencana tahunan tersebut disesuaikan dengan kapasitas sumberdaya organisasi serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang secara pasti lebih tahu mengenai kebutuhan mereka. Namun tidak semua aspirasi yang disampaikan dapat langsung dimasukkan dalam rencana tahunan, ada prioritas yang diutamakan untuk segera direalisasikan dan aspirasi yang lain disesuaikan dengan rencana tahunan berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada tahap perencanaan, KIARA menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program SULTENG TANGGUH yang terbagi dalam tiga tujuan utama (*objective*) seperti berikut ini : 1) Memperkuat komunitas pesisir dan mengembalikan sistem perekonomiannya. Hasil yang diharapkan pada proses ini adalah situasi ekonomi keluarga nelayan di Teluk Palu telah membaik dan kegiatan penangkapan ikan telah dimulai kembali untuk 650 keluarga nelayan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu *pertama*, promosi dan pengelolaan pemasaran perikanan yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang ada dan *kedua*, pendistribusian perahu dan mesin kepada 650 nelayan terdampak bencana. 2) Mempromosikan dan mengimplementasikan pengetahuan lokal terkait pendekatan DRR. Hasil yang diharapkan pada proses ini yaitu koordinasi dan mekanisme respon sebelum, selama dan sesudah bencana dapat diperkuat dan meningkatnya kesadaran mengenai cara-cara ekologi dalam memitigasi bencana. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pembuatan sistem manajemen resiko bencana berdasarkan komunitas dan *Awareness raising* melalui diseminasi hasil untuk penguatan pengetahuan kebencanaan sejak usia dini. 3) Mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya (*media, government and other NGOs*) dengan tujuan yang sesuai dengan program. Hasil yang diharapkan yaitu program kegiatan terpromosikan melalui berbagai materi advokasi dan komunikasi dan program dapat dimonitor dan metodologinya disebarluaskan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu advikasi kebijakan dan membangun jejaring komunikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perencanaan Program SULTENG TANGGUH disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang secara pasti lebih tau mengenai kebutuhan mereka. Namun tidak semua aspirasi yang disampaikan dapat langsung dimasukkan dalam perencanaan program sesuai skala prioritas. Pelaksanaan program direncanakan melalui tiga tahap dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja dan progres kegiatan sehingga dapat menjadi pertimbangan pada pelaksanaan di tahun berikutnya.

### **Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan sebuah sistem atau jaringan kerja dari tugas-tugas, komunikasi serta pelaporan (8). Suatu struktur organisasi hendaknya dapat mendistribusikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan dan menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran organisasi dapat terselenggara dengan baik.

Salah satu manfaat utama dari keberadaan Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah ialah sebagai sarana untuk memudahkan organisasi dalam mengorganisir dan mensinergikan pengelolaan program dengan potensi serta kekuatan yang dimiliki masyarakat dan juga sekaligus menjamin pelaksanaan program dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan adanya kantor perwakilan tersebut menjadi sarana yang dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan lapangan yang membutuhkan kerja cepat dan tepat. Upaya koordinasi bersama pihak-pihak terkait di daerah lebih maksimal terutama dalam membangun kemitraan dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya di bidang ekonomi, sosial, kebencanaan dan lingkungan.

### **Wewenang dan Pengambilan Keputusan**

Dalam tahap pengorganisasian, kantor perwakilandilibatkan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program mulai dari proses mengenali masalah, pendataan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan sebagai wujud partisipasi dan demokrasi. Dengan keterlibatan kantor perwakilan dalam seluruh proses tersebut maka: 1) Memberikan hak yang sama (setara) kepada seluruh karyawan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi dan kesempatan belajar dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir. 2) Meningkatkan kemampuan karyawan dalam memahami masalah- masalah yang mereka hadapi terutama mengenai masalah pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan mencari pemecahannya secarabersama. 3) Persoalan yang muncul menjadi tanggungjawab semua pihak bukan hanya tanggung jawab kantor sekretariat nasional. 4) Memberikan hak dalam menetapkan calon penerima manfaat program SULTENG TANGGUH.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program SULTENG TANGGUH, Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengahmelakukan pengalokasian sumber daya organisasi serta pembagian tugas kepada karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan kondisi lapangan.

### **Pedoman Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Melaut.**

Dalam rangka memperlancar penyaluran bantuan sarana prasarana melaut pada Program SULTENG TANGGUH, maka diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan dan penyaluran serta pedoman bagi petugas di lapangan maupun penerima manfaat sehingga pelaksanaannya tidak mengalami kendala. Adapun tujuan penyusunan pedoman ini yaitu : 1) Memberikan petunjuk dan acuan dalam penyaluran bantuan sarana prasarana melaut bagipetugas di Kantor Sekretariat Nasional KIARA maupun petugas Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah. 2) Sebagai panduan dalam penentuankriteria/syarat penerima manfaat, distribusi bantuandan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhioleh penerima manfaat. 3) Mengoptimalkan pemanfaatan perahu dan mesin untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga nelayan dan program pengembangan perikanan dan kelautan lainnya.

Adapun mekanisme pelaksanaan pedoman penyaluran bantuan sarana prasarana melaut yaitu : 1) Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran bantuan sarana prasarana melaut pada program ini berasal dari dana program pemberdayaan masyarakat pesisir Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang bersumber dari lembaga kemanusiaan asal Perancis bernama CCFD-Terre Solidaire (*Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire*). Jenis bantuan yaitu perahu dengan ukuran di bawah 5 GT berbentuk “*perahu sande*” yang disesuaikan dengan budaya melaut masyarakat setempat dan mesin berkapasitas 5,5 PK. 2) Kriteria lokasi bantuan sarana prasarana melaut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a) Di prioritaskan pada daerah terdampak tsunami terparah di Teluk Palu dan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan

yang dapat dikelola dengan baik. b) Mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal spesifik yang secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alat dan mesin. c) Mempertimbangkan komitmen yang kuat dari masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kriteria penerima manfaat (*beneficiaries*), Penerima manfaat adalah nelayan yang kehilangan sarana prasarana melaut akibat bencana tsunami dan belum mendapatkan bantuan dari pihak lain. Adapun kategori penerima manfaat berdasarkan prioritas yaitu : 1) Nelayan yang kehilangan perahu, mesin dan alat tangkap lainnya serta kehilangan tempat tinggal. 2) Nelayan yang kehilangan perahu, mesin dan alat tangkap lainnya tetapi tidak kehilangan tempat tinggal. 3) Nelayan yang kehilangan salah satu diantara perahu dan mesin serta kehilangan tempat tinggal. 4) Nelayan yang kehilangan salah satu diantara perahu dan mesin tetapi tidak kehilangan tempat tinggal.

Mekanisme Penetapan Calon Penerima Manfaat, Mekanisme Penetapan Calon Penerima Manfaat dari pendataan awal sampai penerimaan bantuan adalah sebagai berikut : 1) Penetapan calon penerima manfaat diawali dengan fasilitator melakukan pendataan langsung kepada nelayan terdampak melalui wawancara ketua kelompok dan anggota. 2) Fasilitator melakukan verifikasi data calon penerima manfaat kepada penyuluh perikanan dan dinas terkait. 3) Fasilitator melakukan triangulasi data kepada kelompok nelayan lainnya, tokoh masyarakat, ketua RT/RW untuk mengukur keabsahan data calon penerima manfaat. 4) Fasilitator menyerahkan data calon penerima manfaat kepada *Project Officer* untuk direkapitulasi dengan data seluruh lokasi pendampingan. Selanjutnya diserahkan ke *Project Leader*.

Data calon penerima manfaat ditetapkan oleh Sekertaris Jenderal KIARA melalui Surat Penetapan Calon Penerima Manfaat dan disampaikan ke Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah untuk dilaksanakan.

### **Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas**

Pedoman penyusunan sistem manajemen pengurangan resiko bencana berbasis komunitas pada Program SULTENG TANGGUH mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pedoman tersebut dapat dilihat pada BAB III bagian Kriteria Umum.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Kriteria tersebut diukur berdasarkan penilaian terhadap tingkat ketangguhan sebuah desa atau kelurahan dalam menghadapi bencana.

Program SULTENG TANGGUH menetapkan kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama untuk dilaksanakan di lokasi pendampingan yaitu Desa Tompe, Kelurahan Lere, Kelurahan Talise, Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Pantoloan Boya. Adapun kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama yang tercantum dalam Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 yaitu : 1) Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan. 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes. 3) Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif. 4) Adanya tim relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. 5) Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatankegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan. 6) Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

### **Penggerakan**

Pada Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah, *Project Leader* Program SULTENG TANGGUH melaksanakan fungsi penggerakan sebagai berikut :

Peningkatan Kualitas SDM, menurut Abdul Rahman dkk (2020), peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan kepentingan organisasi, tugas pokok ataupun fungsi organisasi. Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yakni aspek kualitas fisik dan aspek kualitas non fisik. Adapun kegiatan peningkatan Kualitas SDM yaitu : 1) Pengembangan kapasitas (*capacity building*) adalah proses di mana individu dan organisasi memperoleh, meningkatkan, dan mempertahankan keterampilan, pengetahuan, peralatan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat pesisir secara efisien, efektif, dan responsif atau untuk kapasitas yang lebih besar (skala yang lebih besar, audiens yang lebih besar, dampak yang lebih besar, dll). Kegiatan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu pertama dilakukan secara *in classtraining* di Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah sedangkan tahap kedua kegiatan *out class training* yang dilakukan di pantai Kelurahan Pantoloan Boya. Materi yang diberikan secara *in class* meliputi Pemberdayaan Masyarakat, Teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*), teknik fasilitasi partisipatif, peran fasilitator, *public speaking* dan teknik pelaporan. Pemateri dalam kegiatan ini yaitu dari tim JPKP Buton yang juga merupakan *Senior Advisor* KIARA yaitu Dr. Moh. Arman Manila, M.Si. Sedangkan materi yang diberikan saat *out class* yaitu berupa praktek sederhana dari materi-materi *in class* dan teknik pemecahan masalah (*problem solving*) dan evaluasi hasil. 2) Pelatihan ini ditujukan untuk membekali kemampuan penulisan kepada penggerak program dan dapat menerapkannya melalui tulisan berupa Citizen Jurnalis (CJ). Kegiatan pelatihan ini mengupas tentang jurnalistik dasar, jurnalistik warga, teknik melaporkan berita, dan pengambilan gambar yang mampu bercerita. Adapun pemateri menghadirkan Deputi Advokasi dan Kampanye Sekretariat Nasional KIARA yaitu Fikerman Saragih. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir. Salah satu yang penting dari pelatihan ini adalah bagaimana seorang *information broker* atau jurnalis warga membuat pengamatan dan laporan berdasarkan fakta yang terjadi dari kehidupan masyarakat pesisir di Teluk Palu. 3) Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Studi banding memuat konsep sebagai kegiatan buat meninjau dan melakukan evaluasi pada sebuah objek/tempat lain terutama mengenai aspek-aspek kelebihan dari suatu kegiatan. Untuk itu, Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah telah menugaskan salah satu *Field Officer* atau fasilitator untuk melakukan studi banding ke salah satu komunitas nelayan tradisional yang merupakan dampingan Kantor Sekretariat Nasional KIARA di Muara Angke Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

### **Pengawasan**

Agar Program SULTENG TANGGUH ini dapat berjalan dengan lancar dan transparan maka perlu dilakukan pengawasan (*controlling*) dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan terpadu melalui penyelenggaraan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Setiap selesai pelaksanaan suatu kegiatan, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan/laporan pertanggungjawaban/LPJ untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal usulan kegiatan atau tidak.

### **Transparansi**

Dalam Program SULTENG TANGGUH, penanggung jawab pendampingan dan pengawasan pelaksanaan adalah fasilitator dan *Project Officer*. Semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikelola, harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui video blog, bulletin, surat kabar, dan berbagai media yang memungkinkan. Hal ini bertujuan untuk melakukan kampanye program serta memberikan akses kepada masyarakat luas untuk mengawasi pelaksanaan program. Secara internal, pengawasan terhadap kegiatan pendampingan dilaporkan secara rutin dan berkala dengan senantiasa melaporkan kepada *Project Officer* berupa notulensi pertemuan, kebijakan, dokumentasi kegiatan, kondisi dan laporan keuangan kegiatan, laporan hasilkegiatan, jenis kegiatan yang diusulkan, dan lain-lain.

Informasi-informasi tersebut selain harus disebarluaskan ke masyarakat dan pelaporan internal, juga perlu diinformasikan kepada perangkat pemerintah kelurahan/kecamatan dan kepada Ketua Pecepatan Pemulihan Dampak Bencana Sulteng yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah. Informasi-informasi pokok yang perlu terus menerus disampaikan secara terbuka oleh Kantor Perwakilan KIARA Sulawesi Tengah kepada pemerintah terkait, antara lain adalah jumlah dana bantuan yang diterima dan dikelola, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, perkembangan organisasi dan program pemberdayaan yang dijalankan, rencana-rencana kegiatan program, serta hasil evaluasi program berjalan ataupun hasil pemeriksaan dari berbagai pihak serta informasi-informasi lain.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan (Kantor Sekretariat Nasional), pelaksana program (Kantor Perwakilan) dan penerima manfaat. Penerapan akuntabilitas oleh Kantor Sekretariat Nasional, Kantor Perwakilan dan masyarakat antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan berikut : 1) Konsultasi Publik (Dialog, Seminar, Diskusi Ilmiah), 2) Rapat Koordinasi Triwulan Kantor Perwakilan KIARA Sulteng dengan pemerintah terkait, 3) Rapat Bulanan Kantor Perwakilan KIARA Sulteng, 4) Rapat Tahunan Kantor Sekretariat Nasional KIARA, 5) Rembug Pesisir bersama masyarakat dan pihak terkait di tingkat desa/kelurahan. 6) Diskusi Kampung dengan Kerukunan nelayan di setiap desa/kelurahan.

Setiap selesai pelaksanaan suatu kegiatan, fasilitator (Field Officer) diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal usulan kegiatan atau tidak.

Dengan adanya kegiatan di atas, pengelola program, pemerintah terkait dan masyarakat dapat saling terbuka menyampaikan kritik dan saran untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pada pelaksanaan kegiatan lainnya.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah dapat dikatakan telah optimal. Hal ini berdasarkan pada proses penyusunan rencana strategi pengelolaan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil sesuai dengan prinsip partisipatif dalam manajemen pemberdayaan masyarakat.

### **SARAN**

Rekomendasi saran agar dalam tahap pelaksanaan sering ada kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan atau penyusunan program diawal dikarenakan banyaknya aspirasi tambahan dari masyarakat dan permintaan kegiatan dari pimpinan organisasi diluar program yang telah ditetapkan. Untuk itu sebaiknya dalam tahap perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipisahkan antara kegiatan Program dan kegiatan taktis lainnya sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Saleh A. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Buburan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. UNIMED; 2019.
2. Valentina A, Wardany K, Mariana E. Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. *J Masy Marit*. 2020;4(1):1–11.
3. Fahrudin M, Dirwan D, Rajindra R. Study on the Poverty of Traditional Fishermen in Lombonga Village, Balaesang District, Donggala Regency. *Int J Heal Econ Soc Sci*. 2021;3(3):156–64.
4. Hamdani H, Wulandari K. Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional (The Factor of Poverty Causes Traditional Fisherman). *E-Sospol*. 2016;3(1):62–7.
5. Djiwandono AH, Agustino L, Riswanda R. IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PESISIR TANGGUH DI DESA TANJUNG PASIR KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 2017.
6. Dewi PK. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Kelautan Perikanan. *J DISPROTEK*. 2015;6(2).

7. Rahardjo M. Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya. 2017;
8. Ahmad L. Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi: Sistem Informasi Manajemen. Vol. 1. KITA Publisher; 2018.